

**PERANAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA MENASIONALISASIKAN *DE
JAVASCHE BANK* (SUATU SUMBANGAN MATERI SEJARAH
PEREKONOMIAN INDONESIA DI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN SEJARAH FKIP UM PALEMBANG)**

DISUSUN OLEH:

FATMAH

APRIANA

KARTIKA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telepon 510842

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT TUGAS

Nomor: 771/C.13/FKIP UMP/VIII/2021

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, menugaskan saudara:

1. Nama : Dra. Fatmah, M.Hum.
NIDN : 0210036902
2. Nama : Dr. Apriana, M.Hum.
NIDN : 0220079001
3. Nama : Kartika

Untuk melaksanakan penelitian tentang **“Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan *De Javasche Bank* (Suatu Sumbangan Materi Sejarah Perekonomian Indonesia di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UM Palembang)**

Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab.

Palembang, 22 Syawal 1442 H.
03 Juni 2021 M.

Dekan, *l*



Dr. H. Rusdy AS., M.Pd.
NBM/NIDN : 882609/0007095908

Visi : Menjadi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Berstandar Nasional Dan Menghasilkan Lulusan Yang Berdaya Saing Tinggi Serta Unggul Dalam JPTEKS Yang Berbasis Keislaman Menuju Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Berstandar Internasional Pada Tahun 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR KARYA ILMIAH**

1. Judul Karya Ilmiah : "Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan *De Javasche Bank* (Suatu Sumbangan Materi Sejarah Perekonomian Indonesia di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UM Palembang)"
2. Bidang Ilmu : Pendidikan IPS
3. Ketua Penulis
- a. Nama Lengkap : Dra. Fatmah, M.Hum.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIDN : 0210036902
 - d. Pangkat/Golongan : Lektor/III C
 - e. Jabatan Fungsional : Dosen
 - f. Program Studi : Pendidikan Sejarah
 - g. Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4. Anggota Penulis
- a. Nama Lengkap : Apriana, M.Hum.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIDN : 0204048006
 - d. Pangkat/Golongan : Asisten Ahli
 - e. Jabatan Fungsional : Dosen
 - f. Program Studi : Pendidikan Sejarah
 - g. Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5. Jumlah Penulis : 3 (tiga) orang
6. Jumlah Anggaran :

Mengetahui,
Ketua Prodi Pend. Sejarah



Heryati, S.Pd., M.Hum.

Palembag, 3 Agustus 2021
Ketua Penulis,



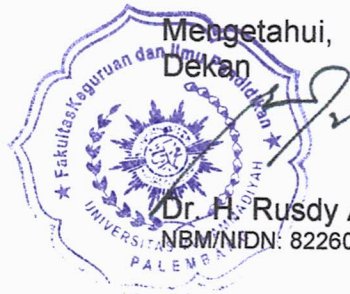
Dra. Fatmah, M.Hum.

Menyetujui
Kepala UPT Jurnal dan PPM



Sulton Nawawi, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Rusdy AS. M.Pd.
NBM/NIDN: 822609/0007095908

ABSTRAK

Kartika. 2021. Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan *De Javasche Bank* (Suatu Sumbangan Materi Sejarah Perekonomian Indonesia Di Program Studi Pendidikan Sejarah Fkip Um Palembang).

Kata kunci : Peranan, Syafruddin Prawiranegara, Nasionalisasi *De Javasche Bank*.

Penelitian dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui latar belakang Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan *De Javasche Bank*. **Rumusan Masalah** yang penulis bahas (1) latar belakang Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958 ? (2) Bagaimana peranan dan pengaruh Syafrudin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958 ? (3) Bagaimana bentuk sumbangan materi Sejarah Perekonomian Indonesia tentang peran Syafruddin Prawiranegara menasionalisasi *De Javasche Bank* di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang?. **Metode** yang penulis gunakan adalah metode penelitian sejarah atau metode *historis*. **Jenis Penelitian** yang digunakan yaitu kajian pustaka (kepustakaan). Penulis juga menggunakan **Pendekatan** geografi, sosiologi, ekonomi, politik, historis, serta penulis berhasil merumuskan beberapa **Kesimpulan** (1) latar belakang Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* adalah Syafruddin Prawiranegara mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Presiden *De Javasche Bank* menggantikan Dr.A. Houwink. Kepercayaan itu didapat tidak hanya dari pemerintah Indonesia melainkan juga pemerintah Belanda. *Kedua* Syafruddin Prawiranegara mempunyai keinginan untuk melakukan Indonesianisasi. *Ketiga* Syafruddin Prawiranegara ingin memberikan pendidikan kepada pegawai. (2). Peranan dan pengaruh Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank*, dengan diangkatnya Syafruddin Prawiranegara sebagai sebagai presiden *De Javasche Bank* mempermudah pemerintah dalam menasionalisasi *De Javasche Bank*, Syafruddin Prawiranegara melakukan Indonesianisasi (SDM) dengan cara mendidik para staf Indonesia melalui program luar negeri, selanjutnya Syafruddin Prawiranegara mensejahterakan para staf dengan cara meminta pemerintah untuk menstabilkan gaji staf Indonesia yang berkerja di *De Javasche Bank*. (3) Bentuk sumbangan dalam penulisan ini penulis menyumbangkan media pembelajaran Banner yang berisikan peran Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank*. **Saran** (1) Bagi pembaca dengan membaca keseluruhan tulisan ini diharapkan mampu mengetahui Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan *De Javasche Bank* (2) Bagi Mahasiswa pendidikan sejarah semoga penulisan ini dapat menginspirasi untuk penelitian selanjutnya. (3) Bagi tenaga pendidik dengan adanya sumbangan bahan ajar berupa banner mampu untuk meningkat pemahaman mahasiswa dalam menyampaikan materi pembelajaran sejarah.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

.....
i

KATA PENGANTAR

.....
ii

DAFTAR ISI

.....
iii

PENDAHULUAN

.....
1

Latar Belakang

.....
1

Batasan Masalah

.....
5

Rumusan Masalah

.....
5

Tujuan Penelitian

.....
6

Kegunaan Penelitian

.....
6

Metode Penelitian

.....
7

Daftar Istilah

.....
7

PEMBAHASAN

.....
9

Latar belakang Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958

.....
9

Peranan dan pengaruh Syafrudin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958

.....
12

Peranan Syafrudin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958

.....
12
Pengaruh Syafrudin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun
1951-1958

.....
15
Bentuk sumbangan materi Sejarah Perekonomian Indonesia tentang peran
Syafruddin Prawiranegara menasionalisasi *De Javasche Bank* di Program Studi
Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Palembang

.....
18
Penutup

.....
22
Kesimpulan.....

22
Daftar Rujukan..... 23

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah amat penting bagi bangsa Indonesia. “ secara politis pernyataan kemerdekaan tersebut memberi kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk membangun dan mengelola negara sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat sendiri. Indonesia menyatakan dirinya merdeka dan ingin membangun negara yang adil, makmur, dan sejahtera serta bebas dari penjajahan ” (Djiwandono, 2005: 5). Pada periode awal kemerdekaan situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya karena Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap.

Dalam rangka menciptakan situasi politik yang memiliki struktur pemerintahan yang lengkap maka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan rapat pertama setelah proklamasi. Selanjutnya pada rapat ini akhirnya melahirkan “ landasan kehidupan bernegara yang meliputi dasar negara yakni sebuah undang-undang dasar yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45, serta mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia ” (Poesponegoro dan Nugroho, 2008: 160).

Walaupun telah diadakan rapat oleh PPKI mengenai struktur pemerintahan Indonesia keadaan politik Indonesia sendiri masih belum stabil. Karena di Indonesia masih banyak ketegangan, kekacauan dan insiden yang terjadi. Hal ini dikarenakan masih adanya sisa-sisa kekuatan Jepang di Indonesia dan adanya keinginan Belanda untuk menguasai dan menjajah kembali Indonesia dengan membonceng Sekutu. “ Pada tanggal 29 September 1945, tentara Sekutu yang diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) yang dipimpin oleh Sir. Philip Christison mendarat di Jakarta. Bersama dengan tentara Belanda yaitu *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang dipimpin oleh Van Mook, kehadiran NICA & AFNEI banyak melahirkan insiden dan pertempuran-pertempuran ” (Kusuma, 2014: 101).

Setelah penandatanganan perjanjian Linggardjati, pasukan militer kedua belah pihak saling menghentikan tembak-menembak dan menarik mundur pasukan militernya. Namun perjanjian Linggardjati tidak berjalan sesuai keadaan yang diharapkan, hal ini dikarenakan adanya

pelanggaran yang terus dilakukan oleh pihak Belanda. Keadaan semakin kacau ketika Belanda memutuskan untuk tidak terikat lagi pada perjanjian Linggardjati dan melakukan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947.

Selanjutnya akibat insiden pertempuran yang melibatkan Indonesia dan Belanda maka pada tanggal 17 Januari 1948 perjanjian Renville akhirnya ditandatangani disusul dengan penghentian tembakan pada tanggal 19 Januari 1948. “perjanjian gencatan senjata yang disetujui oleh Indonesia dan Belanda ditandatangani di atas kapal Renville pada tanggal 17 Januari 1948” (Tobing, 1986: 3). Isi keputusan perjanjian Renville adalah sebagai berikut :

Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai sebagian wilayah Indonesia. Serta disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Kemudian TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Timur (Luktiani dkk, 2019 : 5)

Selain perjanjian Renville, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dilaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB), keputusan KMB berisikan keputusan sebagai berikut :

Menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara bagian bentukan Belanda. Dalam keputusan KMB antara lain juga disetujui pula pembentukan Uni Indonesia-Nederland, pembayaran kembali hutang lama pemerintahan Hindia Belanda oleh Indonesia, dan kesepakatan apabila RIS ingin mengubah mata uang atau membuat undang-undang mata uang baru, maka RIS harus bermusyawarah dulu dengan pemerintahan Belanda. Untuk mengubah undang-undang *De Javasche Bank* atau membentuk Bank sirkulasi baru, pemerintah RIS juga harus melakukan musyawarah dengan pemerintah Belanda serta ditetapkannya *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi bagi seluruh wilayah Republik Indonesia (Djiwandono dkk, 2005: 6).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, walaupun Indonesia telah menyatakan merdeka dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak membuat Indonesia terlepas dari penjajahan. Seperti kedatangan Belanda kembali ke Indonesia dengan membombardir Sekutu untuk dapat menguasai kembali Indonesia. Yang mengakibatkan kekacauan pada waktu itu.

Menurut Kahin (1997: 28) keputusan KMB ini berdampak pada keuangan bangsa Indonesia karena “Indonesia harus membayar hutang lama kepada Belanda sebesar f 3,3 miliar dan hutang eksternal sebesar USD 70 juta”. Akibatnya keputusan KMB ini mewarisi hutang yang amat besar kepada pemerintahan Indonesia sehingga sangat mempersulit upaya pemerintah untuk melakukan rehabilitasi fisik yang hancur akibat pendudukan Jepang dan

perjuangan melawan Belanda. Selanjutnya keputusan KMB tersebut, juga memutuskan untuk menjadikannya *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. *De Javasche Bank* menurut LP3ES (1995: 29) merupakan “bank yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1828, bank ini berdiri atas perintah Raja Willem I melalui surat perintahnya tanggal 29 Desember 1826, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pedagang di daerah jajahan” .

Dalam bidang ekonomi, Indonesia pada masa awal demokrasi liberal mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya karena pada tahun 1949 setelah penyerahan kedaulatan keadaan perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data yang ada pada laporan tahun pembukuan *De Javasche Bank* 1949-1950 yang pada dasarnya hanya memuat data daerah pendudukan Belanda, utang penguasa Belanda sangat besar yang disebabkan defisit anggaran belanja. Hal ini disebabkan Indonesia pada waktu itu harus membayar hutang kepada pihak Belanda sebagai akibat dari keputusan KMB hutang yang telah dibayar kepada Belanda waktu itu mencapai sekitar 4 Milyar Gulden.

Sementara itu status *De Javasche Bank* sebagai bank sentral RIS dan kemudian menjadi Bank Sentral Republik Indonesia mulai dipertanyakan kembali oleh beberapa politisi dan pengamat ekonomi Indonesia. Banyaknya ahli politik dan ekonomi moneter mendesak pemerintah untuk segera menasionalisasikan *De Javasche Bank*, karena Bank Sentral bukan sekedar lembaga yang mengatur masalah moneter tapi juga simbol kedaulatan bangsa. Oleh karna itu aneh jika lembaga semacam itu masih dikuasai oleh lembaga swasta asing” (Darsono, 2016: 12). Pada tanggal 30 April 1951, Menteri Keuangan Mr. Jusuf Wibisono mengumumkan dalam suatu wawancara pers, bahwa “ pemerintah bermaksud untuk menasionalisasi *De Javasche Bank* dalam waktu singkat. Akhirnya pada 12 Juli 1951, pemerintah memutuskan untuk menghentikan Dr. A. Houwink dari jabatan Presiden *De Javasche Bank* dan menggantikannya dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara” (To, 1991 : 273).

Maka atas persetujuan parlemen, pada 29 Mei 1953 presiden RI mengesahkan “Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diundangkan melalui Lembaran Negara No. 40 tahun 1953. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, maka nama *De Javasche Bank* diganti dengan nama Bank Indonesia. Bank Indonesia ditetapkan bukan saja sebagai bank sirkulasi, tetapi juga Bank Sentral” (Darsono, 2016: 238).

Oleh karena itu, sejak 1 Juli 1953, lahirlah Bank Indonesia (BI) sebagai simbol kekuatan Indonesia dalam bidang kehidupan moneter dan perekonomian. “Setelah Indonesia merdeka secara politik tahun 1945, maka pada tahun 1949 baru diakui oleh Belanda, dan empat tahun kemudian yaitu tahun 1953 Bangsa Indonesia baru memiliki bank sentralnya sendiri” (Kusuma, 2014 : 113). Selanjutnya Mr. Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Gubernur pertama Bank Indonesia (BI). Syafruddin Prawiranegara memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menasionalisasikan *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia.

Dalam penulisan ini, penulis juga berkesempatan untuk menggabungkan tulisan secara luas dengan mengkolaborasikan dua kajian yaitu *Sejarah Nasional* dan *Sejarah Perekonomian Indonesia* terutama pada pokok bahasan *Sistem Perekonomian Indonesia Pasca Kemerdekaan* dalam mengkaji sejarah nasionalisasi bank *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia (BI).

Penelitian Bank Negara Indonesia ini sebelumnya pernah ditulis oleh beberapa peneliti. Tulisan pertama oleh Riana Sara (2015) Universitas Negeri Medan, dengan judul *Peranan Syafruddin Prawiranegara Dalam Lintas Sejarah Pemerintahan Republik Indonesia (1945-1961)*, dan Mutya Widyaestari (2015) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, dengan judul *Bank Indonesia 1953-1968 : Upaya menjadi Bank Sentral yang Independen*.

Pembatasan Masalah

Untuk mencapai titik fokus dalam penelitian ini, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penulisan penelitian ini dibedakan menjadi dua aspek yaitu :

Aspek Spatial (ruang atau wilayah) penelitian ini dilakukan pada wilayah Indonesia. Karena penyebaran *De Javasche Bank* dinasionalisasi. Hal ini berarti bahwa bagian *De Javasche Bank* tidak hanya tersebar disatu wilayah saja melainkan tersebar di beberapa wilayah Indonesia yang menjadi cabang dari bank pusat, antara lain di daerah Bandung, Padang, Palembang, Surabaya, Magelang dan lain sebagainya.

Aspek temporal (waktu), terhadap aspek temporal penulis membatasi penulisan yaitu tahun 1951-1958. Karena, tahun 1951 Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi presiden *De Javasche Bank*, karena pada waktu itu Syafruddin memiliki peran dalam menasionalisasikan *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia. Sehingga Syafruddin diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1953. Sedangkan tahun 1958

merupakan tahun pengunduran diri Syafruddin Prawiranegara dari posisi Gubernur Bank Indonesia .

C. Rumusan Masalah

Dari judul penelitian penulis tentang tentang *Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan De Javasche Bank (Suatu Sumbangan Materi Sejarah Perekonomian Indonesia di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang)*, membawa dampak positif untuk mengetahui sejarah yang belum terungkap. Hal ini sangat memotivasi penulis untuk dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Apa latar belakang Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958 ?

Bagaimana peranan dan pengaruh Syafrudin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958 ?

Bagaimana bentuk sumbangan materi Sejarah Perekonomian Indonesia tentang peran Syafruddin Prawiranegara menasionalisasi *De Javasche Bank* di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian tentang *Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan De Javasche Bank (Suatu Sumbangan Materi Sejarah Perekonomian Indonesia di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang)*, adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui latar belakang Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958.

Untuk mengetahui peranan dan pengaruh Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* menjadi tahun 1951-1958.

Untuk mengetahui bentuk sumbangan materi Sejarah Perekonomian Indonesia tentang peranan Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche* di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pemahaman yang baik tentang penulis karya ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis khususnya.

Bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam wawasan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan mahasiswa, serta dapat dijadikan bahan bacaan atau referensi.

Bagi lembaga dapat menambah inventaris kesejarahan khususnya pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat agar lebih mengetahui dan memahami tentang Peranan Syafruddin Prawiranegara Dalam menasionalisasikan De Javasche Bank. Sebagai seseorang yang memiliki peran dalam nasionalisasi *De Javasche Bank*.

Metode Penelitian

Menurut Abdurrahman (2010:103), penelitian adalah “penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap sesuatu objek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau menolak suatu teori”. Sedangkan menurut Anggoro (2007:1), penelitian adalah “sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan proses kegiatan untuk mencari kebenaran terhadap suatu fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis sehingga mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “*Peranan Sujatin Kartowijono Dalam Kongres Perempuan Di Yogyakarta Pada tahun 1928 —1938*”, penulis menggunakan *metode sejarah* atau *metode historis*.

Menurut Abdurrahman (2011:103), metode sejarah adalah “seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, misalnya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan”. Sedangkan menurut Hamid (2011:42), metode sejarah adalah “suatu prosedur-prosedur dalam menyusun

data yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen *otentik* menjadi suatu kisah yang saling berhubungan” .

G. Daftar Istilah

Sesuai dengan judul Proposal penulis yaitu *Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan De Javasche Bank (Suatu Sumbangan Materi Sejarah Perekonomian Indonesia di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang)*, maka penulis dapat menguraikan beberapa defenisi istilah yang digunakan untuk menerangkan berbagai istilah-istilah yang tidak dimengerti, sesuai *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* yang diterbitkan oleh *Karya Agung* karangan Rama tahun 2014 sebagai berikut :

- Allied Forces Netherland East Indies* : Pasukan sekutu yang bertugasmenjalankan tugas pasa perang yang diemban sekutu sebagai pemenang perang dunia ke II.
- Bank* : Badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalulintas pembayaran dan perdagangan uang.
- Bank Indonesia* : Sebuah bank yang didirikan dalam konteks perekonomian negara-negara sedang berkembang.
- Beroperas* : Tidankan yang berupa gerakan.
- De Javasche Bank:* : Bank swasta Belanda Berbentuk perseroan terbatas yang pada tahun 1828 mendapat hak *octroi* sebagai bank sirkulasi.
- De Facto* : Pengakuan Secara nyata terhadap tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah.
- De Jure* : Pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang diikuti dengan tindakan hukum tertentu.
- Devisit* : Berkurangnya kas dalam keuangan.
- Indonesia* : Nama negara dikepuauan Asia Tenggara yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia
- Inflasi* : Kenaikan barang dan jasa selama perode waktu tertentu yang disebabkan oleh penurunan nilai mata uang.

BAB II PEMBAHASAN

Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan De Javasche Bank (Suatu Sumbangan Materi Sejarah Perekonomian Indonesia di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UM Palembang).

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah amat penting bagi bangsa Indonesia. “ secara politis pernyataan kemerdekaan tersebut memberi kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk membangun dan mengelola negara sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat sendiri. Indonesia menyatakan dirinya merdeka dan ingin membangun negara yang adil, makmur, dan sejahtera serta bebas dari penjajahan ” (Djiwandono, 2005: 5). Namun pada periode awal kemerdekaan situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya karena Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap. Selain itu keadaan politik Indonesia masih belum stabil.

Karena kondisi Indonesia belum stabil banyak ketegangan, kekacauan dan insiden yang terjadi, yang disebabkan masih adanya sisa-sisa kekuatan Jepang di Indonesia dan adanya kehadiran Belanda untuk menguasai dan menjajah kembali Indonesia dengan membonceng Sekutu. Selama masa pendudukan Belanda, dilakukan berbagai perundingan untuk memperoleh penyelesaian damai antara Indonesia dan Belanda atas inisiatif pasukan Sekutu dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Perundingan antara pemerintahan Indonesia dan Belanda bukan hanya merundingkan masalah politik dan upaya mengakhiri perang, tetapi juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi, salah satu diantaranya merundingkan masalah perbankan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 UU *De Javasche Bank* yang menyatakan bahwa “hanya akan ada satu bank peredaran yang berkerja di Indonesia” (Ismail, 2009 : 29). Maka dalam perundingan akhirnya disepakatibahwa *De Javasche Bank* yang diakui sebagai bank sirkulasi atau biasa juga disebut sebagai bank peredaran dengan kondisi ini maka pihak Indonesia harus menerima *De Javasche Bank* sebagai bank sentral.

Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 sendiri berisikan keputusan sebagai berikut :

Menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara bagian bentukan

Belanda. Dalam keputusan KMB antara lain juga disetujui pula pembentukan Uni Indonesia Nederland, pembayaran kembali hutang lama pemerintahan Hindia Belanda oleh Indonesia, dan kesepakatan apabila RIS ingin mengubah mata uang atau membuat undang-undang mata uang baru, maka RIS harus bermusyawarah dulu dengan pemerintahan Belanda. Untuk mengubah undang-undang *De Javasche Bank* atau membentuk Bank sirkulasi baru, pemerintah RIS juga harus melakukan musyawarah dengan pemerintah Belanda serta ditetapkannya *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi bagi seluruh wilayah Republik Indonesia (Djiwandono dkk, 2005: 6).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, keadaan negara Indonesia yang belum stabil pada masa awal kemerdekaan, disebabkan masih adanya sisa-sisa kekuatan Jepang di Indonesia dan adanya keinginan Belanda untuk menguasai dan menjajah kembali Indonesia dengan membonceng Sekutu. Hal ini merupakan ancaman yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia secara utuh. Selama masa pendudukan Belanda, dilakukan berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda. Salah satunya adalah perundingan KMB yang menetapkan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dijadikannya *De Javasche Bank* sebagai bank sentral dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank pembangunan, telah menjadikan dualisme perbankan di Indonesia yang mengakibatkan BNI menjadi Bank Pembangunan. Sistem dualisme bank ini menurut Rachbini (2000 : 1) adalah sebagai berikut:

Meskipun *De Javasche Bank* disepakati dan diputuskan bersama oleh pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda sebagai bank sentral, akan tetapi kepentingan kolonial dalam menentukan kebijakan masih kental, posisi *De Javasche Bank* lantas menjadi dilematis karena satu Negara mempunyai bank sentral yang masih berada di bawah kepentingan lain.

Apalagi secara faktual *De Javasche Bank* masih dipimpin dan dikendalikan oleh Dr.A. Houwink, yang memberikan batasan terhadap lisensi secara langsung dengan syarat yang sangat berat bagi perusahaan Indonesia di dalam melakukan perdagangan dengan pihak asing, situasi ini tentu merugikan bangsa Indonesia yang sedang mengalami masalah moneter dan fiskal yang sangat serius” (Ismail, 2009 : 37).

Tentu tidak terelakan adanya perselisihan antara pemerintah Indonesia dan pimpinan *De Javasche Bank*, yang berpuncak pada pengunduran diri Dr. A. Houwink sebagai Presiden *De Javasche Bank*. “Pengunduran diri ini dilakukan setelah Dr. A. Houwink membaca wawancara

Menteri Keuangan Jusuf Wibisono pada tanggal 30 April 1951. Dalam wawancara tersebut Jusuf Wibisono menyatakan bahwa pemerintah Indonesia merencanakan melakukan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank*” (To, 1991 : 273). Menurut Dr. A. Houwink upaya melakukan nasionalisasi *De Javasche Bank* sebagai bentuk pelanggaran terhadap pasal 19 persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Setelah diketahui secara pasti bahwa Dr. A. Houwink tidak akan melanjutkan tugasnya sebagai Presiden *De Javasche Bank*, maka direksi *De Javasche Bank* menyetujui usul Paul Spies untuk mencalonkan Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden *De Javasche Bank*. Paul Spies pula yang disetujui untuk menghubungi Syafruddin Prawiranegara untuk meminta kesediannya menjadi Presiden *De Javasche Bank*. Terhadap permintaan ini Syafruddin Prawiranegara menolaknya, karena dia merasa tidak punya pengalaman dalam bidang perbankan serta keinginan untuk berkonsentrasi mengurus keluarganya. Selain itu Syafruddin Prawiranegara juga “merasa bahwa beliau telah lelah dan ingin beristirahat, beliau pun berpikir ingin mencari pekerjaan dengan menjadi pegawai swasta karena menurut beliau gaji dan kemudahan menjadi pegawai pemerintah tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga” (Ismail, 2009 : 43).

Namun atas permintaan Wakil Presiden Moh. Hatta yang meminta agar Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Presiden *De Javasche Bank*. Serta adanya tekanan dari pihak Belanda yang memberikan kepercayaan dan menyetujui Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden *De Javasche Bank*.. akhirnya Syafruddin Prawiranegara menerima jabatan sebagai Presiden *De Javasche Bank*.

Tujuan lain Syafruddin Prawiranegara menerima tawaran menjadi Presiden *De Javasche Bank* adalah “untuk mendidik orang-orang Indonesia, agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Dalam dunia perbankan agar dapat menggantikan tenaga-tenaga ahli Belanda” (Sudarjat, 2017 : 149). Maka dengan itu sejak tanggal 15 Juli 1951 Syafruddin Prawiranegara resmi memegang jabatan sebagai Presiden *De Javasche Bank*. Maka dari itu Syafruddin Prawiranegara merupakan orang Indonesia pertama dan terakhir yang menjabat sebagai *Presiden De Javasche Bank*.

Peranan dan Pengaruh Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958.

Peranan Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958.

Upaya yang telah diberikan dalam menasionalisasi *DeJavasche Bank* tentunya sangat bermakna dalam kehidupan bangsa Indonesia. Syafruddin Prawiranegara adalah salah satu tokoh yang telah berjasa dalam nasionalisasi *De Javasche Bank*. Dalam peristiwa nasionalisasi *De Javasche Bank* sehingga menjadi Bank Indonesia. Dalam peristiwa nasionalisasi *De Javasche Bank* pada tanggal 30 April 1951, “Menteri Keuangan Jusuf Wibisono mengumumkan dalam wawancara pers maksud pemerintah untuk menasionalisasi *De Javasche Bank* dalam jangka pendek” (Prawiranegara, 2011 : 106).

Dari cara pengumuman itu, dengan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada direksi bank. Membuat Dr. A. Houwink merasa terkejut karena tidak pernah diberitahu terlebih dahulu. Karena itu beliau mengajukan permohonan berhenti karena merasa tidak dihargai lagi oleh pihak pemerintah Indonesia. Sebagai penggantinya diangkat Syafruddin Prawiranegara yang resmi memangku jabatan Presiden *De Javasche Bank* pada tanggal 15 Juli 1951. Syafruddin Prawiranegara memiliki peranan dalam menasionalisasi *De Javasche Bank* salah satunya yakni dengan, bersediannya Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Presiden *De Javasche Bank* menggantikan Dr. A. Houwink telah memberikan peran yang sangat penting dalam menasionalisasi *De Javasche Bank*.

Karena dengan bersediannya Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Presiden *De Javasche Bank*, akan mempermudah pemerintah dalam menjalankan nasionalisasi *De Javasche Bank*. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa alasan diangkatnya Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden *De Javasche Bank* dikarenakan adanya kepercayaan pemerintah Belanda, disebabkan oleh Syafruddin Prawiranegara yang bersifat kooperatif kepada pemerintah Belanda. Kooperatif sendiri menurut (Qonita, 2009 : 374) adalah “ suatu sifat yang berkerja sama bersedia untuk saling membantu ” . Sifat kooperatif Syafruddin Prawiranegara terhadap pemerintah Belanda dapat dilihat dari pernyataan Syafruddin Prawiranegara yang menyatakan bahwa “ nasionalisasi *De Javasche Bank* tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru. Karena tenaga Indonesia dikatakan belum ada yang memiliki keahlian atau berkompentensi perbankan. Sedangkan tenaga ahli perbankan kebanyakan adalah orang-orang Belanda ” (Rosidi, 2011 : 270).

Menurut Syafruddin Prawiranegra tenaga kerja Indonesia belum ada yang berkompeten, oleh karena itu masih perlu dilakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Selain itu menurut

itu kepada pemerintah pada umumnya dan untuk memajukan rencana undang-undang nasionalisasi khususnya” (Prawiranegara, 2011 : 106).

Untuk menjalankan tugasnya maka panitia memilih jalan melalui pembelian saham-saham oleh pemerintah atas dasar suka dan rela. Di bulan Juli 1951 “Pemerintah mengirim dua orang pejabat ke negeri Belanda untuk menyelenggarakan pembelian saham-saham tersebut. Kedua pejabat yang diberi kuasa oleh pemerintah adalah M. Saubari dan Kouw Bian” (TO, 1991 : 246).

Pada tanggal 3 Agustus 1951 Pemerintah Republik Indonesia mengajukan tawaran kepada pemilik saham *De Javasche Bank*. Tawaran tersebut muncul dalam surat kabar di negeri Belanda antara lain, “*Het Financieel Dagblad*”. Selanjutnya penawaran dilakukan dengan mata uang Belanda, karena saham-saham *De Javasche Bank* untuk sebagian besar berda di negeri Belanda.

Pembelian surat-surat yang ada pemegang-pemegang saham ataupun sertifikat saham-saham *De Javasche Bank* dengan kurs 120% mata uang Nederland, c.q. harga timbalan dalam satuan uang dari tempat mereka tinggal dengan pengertian bahwa pemegang-pemegang surat-surat yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan menjadi penduduk devisa Indonesia, akan menerima bayaran dalam rupiah dengan kurs 360% (Prawiranegara, 2011 : 107).

Boleh dikatakan sambutan dari pemilik saham sangat baik. Dalam waktu dua bulan saja Pemerintah Republik Indonesia sudah membeli saham-saham dengan nominal sebesar f 8,95 juta, atau hampir seluruh jumlah saham “pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank* N.V. (Undang-Undang 1951 dengan No. 24 Lembaran Negara R.I. 1951 No. 120), yang menyatakan bahwa keperluan umum menghendaki supaya *De Javasche Bank* NV dinasionalisasikan” (To, 1991 : 248). Selanjutnya ditekankan, bahwa saham-saham yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia segera dicabut dan pindah menjadi milik penuh dan bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda.

Dengan ini berakhirlah “babak pertama dan tugas panitia nasionalisasi, tetapi bagian yang paling penting lagi, yaitu merencanakan undang-undang bank baru untuk Bank Sentral Indonesia yang telah dinasionalisasi” (Prawiranegara, 2011: 108). Maka dari itu pemerintah akhirnya menetapkan “Undang-undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953 sehingga melahirkan Bank Indonesia yang dicita-citakan oleh Undang-

undang Dasar 1945” (LP3ES, 1995 : 73). Dalam UUPBI pasal 1 menyatakan bahwa “Dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu bank yang menggantikan *De Javasche Bank* dan bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia” (To, 1991: 250).

Pengaruh Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* tahun 1951-1958.

Pada **bidang politik** Syafruddin Prawiranegara memiliki pengaruh yakni mengajukan undang-undang untuk memisahkan antara organisasi, *De Javasche Bank* dan pemerintah, karena itu pemerintah tidak mempunyai kekuasaan terhadap *De Javasche* “Dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, batas organisasi tidak tegas, dalam arti pemimpin tertinggi bank tidak lagi direksi melainkan dewan moneter yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank” (LP3ES, 1995 : 73). Dengan adanya dewan moneter menurut Syafruddin Prawiranegara sudah tidak adalagi keragu-raguan tentang pertanggung jawaban atas kebijaksanaan moneter umum, pada pemerintah.

Dewan Moneter sendiri berfungsi sebagai “lembaga yang melakukan koordinasi antara kebijakan pemerintah dan Bank Sentral. Dewan Moneter dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari presiden untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan moneter yang telah ditetapkan pemerintah” (Ismail, 2009 : 93). Hal ini mengingat keberadaan Bank Sentral berada di luar departemen-departemen dan gubernur bank sentral tidak berkedudukan sebagai menteri. Gagasan tentang dewan moneter yang berasal dari pemikiran Syafruddin Prawiranegara, dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik antara pemerintah dan direksi bank.

Pengaruh Syafruddin Prawiranegara dalam **bidang ekonomi**, dengan diangkatnya Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden *De Javasche Bank* menggantikan Dr. A. Houwink. Telah memberikan pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi karena dapat memudahkan pemerintah menasionalisasi *De Javsche Bank* menjadi Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri sangat berpengaruh dalam perekonomian Indonesia karena Bank Indonesia sendiri menurut pasal 7 UU No. 11 Tahun 1953 bertugas “mengatur nilai satuan mata uang Indonesia demi tercapainya kemakmuran bangsa dan kewajiban menjaga keseimbangan nilai mata uang. Tugas

lain Bank Indonesia dinyatakan pula Bahwa Bank Indonesia menyelenggarakan peredaran uang kertas dan mengatur jalannya dengan luar negeri” (Ismail, 2009: 55)..

Selain itu Syafruddin Prawiranegara selama menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, memberikan pemikirannya kepada pemerintah mengenai bahaya inflasi yang akan menghambat pembangunan. Mengingat “pada tahun 1950 pemerintah seringkali mengambil jalan pintas mengatasi kekurangan anggaran belanja negara dengan cara mencetak uang sebanyak-banyaknya, namun tidak memperhitungkan persediaan barang dipasaran. Akibatnya inflasi yang tinggi sering terjadi” (Sudarjat, 2017 : 155). Sedangkan menurut Syafruddin inflasi itu merupakan faktor yang sangat merusak ekonomi.

Selain pemikirannya berpengaruh terhadap bahaya inflasi Syafruddin Prawiranegara juga berpendapat bahwasannya, upaya menjaga stabilitas ekonomi adalah masalah neraca pembayaran dan anggaran belanja negara. Oleh karena itu Syafruddin Prawiranegara berpendapat bahwa “neraca pembayaran dan anggaran belanja negara adalah barometer untuk mengatur perekonomian suatu negara ” ” (Prawiranegara, 1988 : 43). Oleh karena itu Syafruddin Prawiranegara selalu mengusahakan “agar neraca pembayaran selalu seimbang, sehingga tidak terjadi defisit. Apabila defisit tidak dapat dihindari, seperti yang terjadi pada tahun 1950-an, maka defisit tersebut harus ditutup dengan pinjaman luar negeri” (Sudarjat, 2017 : 156).

Sedangkan pengaruh Syafruddin Prawiranegara dalam **bidang Sosial**, dengan cara memberikan pembinaan kepada staf sebagai kelanjutan Indonesianisasi di masa *De Javasche Bank*. Indonesianisasi ini dilakukan untuk menunjang SDM agar dapat menggantikan tenaga-tenaga ahli Belanda. Dengan cara mendidik orang-orang Indonesia agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dibutuhkan pada jabatan-jabatan tertentu khususnya dalam bidang perbankan. Pada umumnya, latihan di luar negeri dijalankan “selama 6 bulan di cabang Amsterdam dan kemudian 6 bulan di London tepatnya di *Llyods Bank* dan *Chartered Bank*, selain itu pelatihan juga dilakukan di Amerika Serikat dan Jerman. Latihan praktek di kantor pusat berlangsung melalui bagian pembukuan, kas dan wesel” (LP3ES, 1995 : 100).

Syafruddin berpendapat dengan “ mendidik orang-orang Indonesia diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dibutuhkan pada jabatan-jabatan tertentu di dunia industri perbankan. Setelah itu barulah mereka dapat menggantikan posisi yang semula

dipegang orang asing” (Sudarjat, 2017 : 149). Kemudian latihan kerja bagi tenaga-tenaga staf sebagai calon pegawai staf pada waktu itu dilakukan dengan penyaringan yang ketat. Bimbingan dilakukan secara intensif. Aspek-aspek yang dipelajari dan diajarkan tidak hanya “ keterampilan teknis perbankan melainkan juga segi-segi etika dikantor, sikap terhadap atasan maupun dengan rekan, juga dalam pergaulan diluar dinas misalnya etika dalam jamuan makan, ketika berbicara dengan tamu, dalam menerima telepon dan sebagainya” (LP3ES, 1995 : 101)

Selain itu Syafruddin Prawiranegara juga memiliki pengaruh dalam mensejahterakan para staf. Dengan cara meminta pemerintah agar memperhatikan tingkat upah staf Indonesia agar disamakan dengan staf Belanda. “Selain itu gaji staf Indonesia tidak akan berubah setelah dinasionalisasikannya *De Javasche Bank*. Dengan perkataan lain, tingkat pengupahan para karyawan bank tidak akan diturunkan pada tingkat pegawai negeri Indonesia” (Rosidi, 2011 : 275). Karena menurut Syafruddin Prawiranegara gaji sebagai pegawai pemerintah sangat kurang untuk mencukupi keperluan hidup.

Bentuk Sumbangan Materi Sejarah Perekonomian Indonesia Tentang Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan *De Javasche Bank*.

Dalam rangka memperkaya kajian materi Sejarah Perekonomian Indonesia di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang dan dalam menambah wawasan pendidik mengenai kekayaan informasi pengetahuan sejarah guna menanamkan pada jiwa akan pentingnya kecintaan terhadap sejarah perekonomian. Maka penulis berharap dengan adanya sumbangan bahan ajar berupa banner pada bahasan tentang *Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan De Javasche Bank (Suatu Sumbangan Materi Sejarah Perekonomian Indonesia di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang)*, dapat membantu kelancaran proses belajar mengajar.

Pengertian sumbangan sering disebut donasi, sedangkan donasi dalam bahasa Inggris adalah *Donation*, selanjutnya dalam bahasa Latin *Donum*, sumbangan merupakan sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara perorangan, sokongan atau badan hukum, “ Sumbangan ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian sumbangan dapat berupa barang, pakaian, mainan dan bentuk lainnya yang mempunyai nilai kegunaan bagi banyak orang” (Susanto & Susantoputra, 2015:187).

Dalam Rencana Pembelajaran Semester pada mata kuliah Sejarah Perekonomian Indonesia di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang terdapat pokok bahasan *Sistem Perekonomian Indonesia Pasca Kemerdekaan 1945*. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menfokuskan tentang *Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan De Javasche Bank tahun 1951-1958*.

Bahasan ini dimulai dari gagasan pemerintah yang memutuskan untuk menasionalisasikan *De Javasche Bank* pada tanggal 28 Mei 1951. Maka Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai Presiden *De Javasche Bank* menggantikan Dr.A. Houwink. Maka pada tanggal 28 Mei 1951 Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan nasionalisasi bank, dengan keputusan pemerintah no.118 tgl. 2 Juli 1951, dibentuklah panitia nasionalisasi *De Javasche Bank* pada tgl. 19 Juni 1951. “Panitia ini mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perundingan-perundingan mengenai nasionalisasi bank atas nama pemerintah, mempunyai tugas untuk mengajukan usul mengenai nasionalisasi itu kepada pemerintah pada umumnya dan untuk memajukan rencana undang-undang nasionalisasi khususnya” (Prawiranegara, 2011 : 106). Setelah itu dimulailah nasionalisasi terhadap *De Javsche Bank* dengan cara pembelian saham kepada pemilik saham. baik dari luar negeri maupun dari Indonesia sendiri.

Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik maka tenaga pendidik harus menggunakan bahan pembelajaran untuk membantu kelancaran menyampaikan materi, menurut Ika Lestari (2013 :1) bahan ajar adalah “seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan” . Salah satu bahan pembelajaran yang penulis buat dan menjadi sumbangan pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIPUniversitas Muhammadiyah Palembang sehubungan dengan penelitian ini adalah banner.

Sebagai bahan pembelajaran fungsi banner adalah untuk mempermudah dalam menyampaikan isi materi khususnya pada pokok *Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan De Javasche Bank*. Sebagai bahan pembelajaran banner secara umum merupakan salah satu bentuk bahan untuk menyampaikan promosi iklan yang sudah dicetak menggunakan print digital memiliki bentuk vertikal dan horizontal, “Dalam bahasa Belanda banner atau spanduk disebut juga *spandoek* yang berarti kain yang direntangkan untuk menyampaikan informasi” (Madjadikara, 2005:52).

Banner yang disumbangkan penulis adalah berukuran 80x180 cm, hal ini untuk menyampaikan beberapa point isi dari judul penelitian penulis yaitu *Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951-1958 (Suatu Sumbangan Materi Sejarah Perekonomian Indonesia di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang)*. Banner berisikan mengenai materi pembelajaran yang menjelaskan Biografi Syafruddin Prawiranegara, latar belakang keterlibatan Syafruddin Prawiranegara dalam menasionalisasikan *De Javasche Bank*, peranan Syafruddin Prawiranegara dalam menasionalisasikan *De javasche Bank*, dan pengaruh Syafruddin Prawiranegara dalam menasionalisasikan *De javasche Bank*.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Latar Belakang Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank* adalah *pertama*, Syafruddin Prawiranegara mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Presiden *De Javasche Bank* menggantikan Dr.A. Houwink. Kepercayaan itu didapat tidak hanya dari pemerintah Indonesia melainkan juga pemerintah Belanda. *Kedua* Syafruddin Prawiranegara mempunyai keinginan untuk melakukan Indonesianisasi terhadap orang-orang Indonesia agar dapat menggantikan tenaga ahli Belanda. *Ketiga* Syafruddin Prawiranegara juga memiliki tujuan untuk mendidik orang-orang Indonesia agar memiliki keterampilan yang baik pada bidang perbankan.

Peranan Syafruddin Prawiranegara menasionalisasikan *De Javasche Bank*. adalah *pertama*, dengan bersedianya beliau diangkat menjabat sebagai presiden *De Javasche Bank* menggantikan Dr. A. Houwink. Telah mempermudah pemerintah dalam menasionalisasikan *De Javasche Bank*. *Kedua*, Syafruddin juga memberikan pendidikan kepada calon tenaga kerja *De Javasche Bank*, sehingga dapat menggantikan tenaga ahli Belanda. *Ketiga*, Syafruddin Prawiranegara juga berusaha mensejahterakan gaji staf Indonesia dengan cara meminta pemerintah untuk menyamakan gaji staf Indonesia dengan staf Belanda.

Pengaruh Syafruddin Prawiranegara dalam menasionalisasikan *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia adalah dalam *Bidang Politik*, untuk menjaga stabilitas dari Bank Indonesia Syafruddin Prawiranegara membentuk dewan moneter. Dalam *Bidang Ekonomi*, untuk mengatasi bahaya inflasi yang akan menghambat pembangunan, Syafruddin Prawiranegara memberikan sumbangan pemikirannya kepada pemerintah. Selanjutnya dalam *Bidang Sosial*, untuk mengindonesianisasikan SDM, Syafruddin Prawiranegara memberikan pelatihan

pendidikan, agar dapat menggantikan tenaga-tenaga ahli Belanda. Selain itu untuk mensejahterakan staf, Syafruddin Prawiranegara meminta pemerintah agar memperhatikan tingkat upah staf Indonesia untuk disamakan atau disejajarkan dengan staf Belanda.

Bentuk sumbangan bahan ajar tentang *Peranan Syafruddin Prawiranegara Menasionalisasikan De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951-1958* adalah berupa *banner*, fungsi banner sebagai bahan pembelajaran untuk mempermudah dalam proses belajar pembelajaran. Ukuran *banner X* yang disumbangkan adalah 80x180 cm.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggoro, M. Toho, *dkk.* 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Abdurahman, Dudung. 2010. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Abdurahman, 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Darsono. 2016. *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali.
- Djiwandono, S. 2005. *bergulat dengan krisis dan pemulihan ekoomi indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ismail, Maqdir. 2009. *Bank Indonesia Dalam Perdebatan Politik dan Hukum*. Navila Idea: Yogyakarta.
- Ika Lestari, 2013. *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai Dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Padang : Akademik Permata.
- Kahin, A. 1997. *Perjuangan Kemerdekaan: dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Terjemahan Jakarta : Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).
- Kusuma, Erwien. 2014. *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta : Kompas Media.
- Madjadikara S Agus. 2005. *Bagaiman Biro Iklan Memproduksi Iklan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Poesponegoro Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2008 : *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prawiranegara, Sjafruddin. 1987. *Recollections of My Career, Bulletin Indonesia Economic*. Vol 23, No. 3.
- Prawiranegara, Sjafruddin. 2011. *Ekonomi dan Keuangan Jilid 2*. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Prawiranegara. 1972. *Bung Hatta Demokrat Sedjati dan Pemimpin Bangsa jang Saja Hormati*. Jakarta : Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70.
- Rama, Tri K. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Karya Agung.
- Rachbini, Didik. J, dan Tono, Suwidi. 2002. *Bank Indonesia Menuju Indenpendensi Bank Sentral*. Jakarta : PT. Mardi Mulyo.

- Rosidi, Ajip. 2011. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Sudarjat, Edi. 2017. *Sjafruddin Prawiraegara : Biografi Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia*. Depok : Komunitas Bambu.
- Susanto Heru dan Susantoputra Nataniel Kristian. 2015. *Bijak Memperdayakan Uang Pelastik*. Bandung : PT Elex Media Komputindo.
- LP3SES. 1995. *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. PT Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta
- Tobing K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia : Renvile*. Jakarta : Gunung Agung
- To. Oey Beng. 1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*. Jakarta: LPPI.
- Qonita, Alya. 2009. *Kmaus Besar Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*. Bandung: Indahjaya Adipratama